



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRIA ANDAKA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**
3. NHK : **816041**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.545.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1340 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 526.000.000
2. Tanah Seluas 3295 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 276.000.000
3. Tanah Seluas 2762 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 178.000.000
4. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 105.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/138 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 180.700.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



5. MOTOR, HONDA ASTREA STAR Tahun 1994, HASIL SENDIRI
Rp. 1.150.000
6. LAINNYA, POLIGON SEPEDA ONTHEL Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.400.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.358.870

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.807.458.870

III. HUTANG Rp. 125.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.682.458.870

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.